

**KAJIAN TERHADAP POTENSI  
ANAK JALANAN DAN MASYARAKAT  
PEDONGKELAN PULOGADUNG JAKARTA TIMUR  
DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU KEHIDUPAN  
DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
(Suatu Penelitian Pemberdayaan)**

Oleh  
Endang Purwaningsih  
Fakultas Hukum Universitas YARSI  
Email: e.purwaningsih@yarsi.ac.id

***Abstract***

*Street children and community members of Pedongkelan—Pulogadung—have been showing poor moral, social, and legal awareness in their daily lives. It therefore requires in-depth study and sustainable follow-up measures in a bid to alleviate poverty, empower the street children's potentials, and tackle all sorts of other related problems, which originate in their poor economic capacity referring to their low sense of achievement, poor skills, and poor knowledge. The underlying issues on this matter lie in how to formulate strategies to address community empowerment in a bid to improve quality life of the street children and other community members where they live in Pedongkelan and how to orchestrate the roles of the academic people and the respective bureaucrats to join forces with their respective constituents. This research uses a normative method, with sociological approach, to endorse the proposed PRA (Participatory Rural Appraisal) implementation. The findings suggest (1) that the most appropriate empowerment programs for the street children and other community members in Pedongkelan are through the implementation of science and technology programs, the implementation of character building programs, the implementation of potential economic building programs on the religious basis, the implementation of economic stability programs, and the promotion of legal awareness programs. In doing so, it is important to make opportunities available, conduct serious and sustainable sectorial programs, design specific programs to curb the number of street children, poor people, and thugs or criminals, implement integrated and gradual programs, have psychosocial approach for target groups, and improve the target group's productive skills and their skills in giving added value to their products. All of these should be supported by (2) the government's role, academic people, and related institutions. Above all, coordination among and participation of these related parties are of the utmost importance.*

**Keywords:** *street children's potency, quality life, legal awareness*

### **Abstrak**

Tingkat kesadaran moral sosial dan kesadaran hukum sama sekali tidak terwujud dalam kehidupan keseharian anak jalanan dan warga masyarakat Pedongkelan. Diperlukan kajian yang sangat mendalam dan tindakan yang berkesinambungan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, memberdayakan potensi anak jalanan dan segudang permasalahan yang melingkupi kehidupan mereka, yang sebenarnya berpangkal tolak dari ketidakmampuan secara ekonomi dan kekerdilan mental, moral, skill serta ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Permasalahan serius pada masyarakat Pedongkelan berkenaan dengan anak-anak jalanan dan lingkungan masyarakatnya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat yang tepat bagi penanganan anak-anak jalanan dan lingkungan masyarakatnya tersebut dan Bagaimana peran akademisi dan birokrat dapat terkait dan menyatu dengan partisipasi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan sosiologis, untuk mendukung usulan penerapan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: (1) Program pemberdayaan yang tepat bagi anak jalanan dan warga Pedongkelan Pulogadung secara garis besar melalui penerapan program ipteks dan *character building*, penerapan program sinergi religi dan pengenalan potensi ekonomi, penerapan program pemantapan ekonomi dan sadar hukum. Upaya yang perlu dilakukan adalah memberi perhatian dengan membuka peluang, Melakukan program Sektoral secara serius dan berkesinambungan, Program pembangunan yang benar-benar dapat mengurangi jumlah anak jalanan dan penduduk miskin, upaya penanggulangan premanisme dan kejahatan, Pelaksanaan program secara terpadu dan bertahap, pendekatan psikososial dengan kelompok sasaran, upaya meningkatkan kemampuan berproduksi dan menciptakan nilai tambah, didukung (2) Peran Pemerintah, Akademisi dan lembaga terkait sangat penting yakni pelaksanaan koordinasi dan partisipasi aktif semua pihak, antar lembaga dan masyarakat.

**Kata kunci:** potensi anak jalanan, mutu kehidupan, kesadaran hukum

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pedongkelan merupakan kawasan yang cukup kumuh, terletak di sekitar 'Coca Cola' arah Pulogadung. Pedongkelan adalah TERITORI ANAK JALANAN letaknya dekat danau di sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan. Daerah ini dihuni oleh para pemulung, pengamen dan rakyat jelata yang kondisinya jauh di bawah rentang kemiskinan. Kawasan ini terkenal sebagai kawasan tidak nyaman dan tempat banyak berkeliaran penodong, waria, pencopet, kapak merah dan gelandangan. Bila menengok keseharian Pedongkelan, dari pagi

hingga malam, maka di kolong jembatan layang tergeletak banyak pengemis, serta anak jalanan yang makin marak penghuninya setiap saat.

Pedongkelan terletak di daerah Pulogadung Jakarta Timur, dengan akses kehidupan yang sangat beragam dan dekat dengan lalu lintas perdagangan. Daerah Pedongkelan dekat dengan Cempaka Mas (ITC), dekat dengan Pulogadung Trade Centre dan Kawasan Industri Pulogadung. Ketiga tempat tersebut tak mengubah kreativitas mereka, tak membuat mata mereka menjadi terbuka, akan tetapi justru mereka makin merunduk pada dimensi ketidakberdayaan dengan segala kekurangan. Dengan keterbatasan dan keterpurukan, potensi pada masyarakat dan anak-anak jalanan seakan lenyap ditelan bisingnya lalu lalang kendaraan. Mereka hanya tahu bagaimana mengamen, bagaimana menodong, bagaimana mengemis dengan mengiba, dengan tujuan akhir adalah uang, dengan dalih uang adalah penyambung kehidupan.

Profil masyarakat dengan segala keterbelakangan, kemiskinan, tanpa pendidikan, tanpa kesejahteraan, akan tetapi sangat menikmati kehidupan yang sangat menyedihkan dan memalukan. Betapa tidak memalukan, karena mental mereka sudah sangat parah, ibarat penyakit sudah 'akut', mereka diberi makanan, akan bilang "kasih saja saya 'gopek' atau apa saja yang berwujud uang". Mereka merasa mengemis adalah tugas yang halal, mengamen adalah pekerjaan yang bagus, meskipun di tiap kata-katanya selalu bilang 'mencari solusi yang halal', cari kerja susah dan sebagainya.

Tingkat kesadaran moral sosial dan kesadaran hukum sama sekali tidak terwujud dalam kehidupan keseharian mereka. Mereka bahkan senang jika penumpang merasa takut dengan penampilan 'preman' mereka, dan menuruti kemauan mereka untuk sekedar menyumbang nafkah ekonomi keluarganya. Baik anak-anak, perempuan setengah dewasa dan laki-laki dewasa, bergantian turun naik dalam angkot di sekitar Pulogadung, seperti nyanyian tanpa urat malu mereka, sungguh perlu pembenahan yang sangat serius sampai akar permasalahannya.

Diperlukan kajian yang sangat mendalam dan tindakan yang berkesinambungan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, memberdayakan

potensi anak jalanan dan segudang permasalahan yang melingkupi kehidupan mereka, yang sebenarnya berpangkal tolak dari ketidakmampuan secara ekonomi dan kekerdilan mental, moral, skill serta ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Permasalahan serius pada masyarakat Pedongkelan berkenaan dengan anak-anak jalanan dan lingkungan masyarakatnya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat yang tepat bagi penanganan anak-anak jalanan dan lingkungan masyarakatnya tersebut dan Bagaimana peran akademisi dan birokrat dapat terkait dan menyatu dengan partisipasi masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan sosiologis, untuk mendukung usulan penerapan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Dengan melakukan analisis SWOT akan diketahui harapan yang akan bisa diraih, jika pemberdayaan masyarakat benar-benar dilakukan secara simultan dan sungguh-sungguh. Anak-anak jalanan tentu saja tidak bisa dibiarkan menjadi sampah kota, yang makin hari makin menumpuk dan menambah beban iklim kemajuan kota. Kepedulian akademisi dan birokrasi harus lebih difokuskan untuk mengentaskan problematik yang melingkupinya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian sosial yakni *qualitative research*.

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis SWOT terhadap kondisi internal dan lingkungan eksternal, agar dapat menentukan program pemberdayaan yang diusulkan dapat diterapkan secara tepat terhadap anak-anak jalanan dan warga Pulogadung umumnya. Penelitian ini menekankan pada data sekunder dalam mengkaji penerapan asas kesadaran hukum dan teori pemberdayaan serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian dalam penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan *literary study* dan *field study* dengan *sociologisch approach* sehingga data akan diperoleh baik dari kepustakaan, maupun lapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pemberdayaan Masyarakat bagi Penanganan Anak-Anak Jalanan dan Lingkungan Masyarakat Pulogadung**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengamen jalanan dan warga di sekitar Pedongkelan Pulogadung, bahwa akar permasalahannya menurut warga adalah ketidakberdayaan ekonomi, sehingga mereka terpaksa melepaskan anak-anaknya di jalanan. Namun, perlu disadari bahwa budaya ‘mengorbankan’ kepentingan anak akan makin mendarah daging, bahkan orangtua merasa menikmati hasil jerih payah anaknya yang masih di bawah umur, jika tidak ditangani secara serius.

Beberapa gadis muda terlihat sebulan mengamen, namun lima bulan kemudian terlihat perutnya membuncit (hamil). Peneliti mengamati hal ini hampir setiap hari dalam perjalanan Bekasi-Pulogadung, dan Taman Harapan- Baru Pulogadung. Anak-anak ngamen dengan penampilan dekil juga berlalu lalang turun naik angkot 01, 31, 20 bahkan yang dewasa pun cukup banyak. Ada musim-musim tertentu di mana banyak berdatangan pengamen baru, bahkan sering rombongan.

Anak-anak kecil berumur 3-5 tahun pun banyak mengamen, kadang bersama kakak (temen yang lebih tua) atau bahkan sendirian. Peneliti menjumpai di arah Cakung-Pulogadung, seorang anak perempuan sekitar 9 tahun masih mengempeng seperti bayi digandeng seorang nenek, bahkan ada juga seorang anak laki-laki kerepotan menggendong bayi umur 5 bulanan mengemis. Ketika ditanyakan kok tidak sekolah, malah mau ngemis, katanya disuruh ibunya, ibunya tidak kerja, ayahnya tidak tahu kemana perginya. Dia menyesali kenapa jadi orang bodoh dan punya orangtua yang bodoh dan miskin.

Untuk membentuk masyarakat yang makin berdaya dan meningkat dalam mutu kehidupan baik secara fisik maupun nonfisik, dilandasi kemapanan ekonomi dan kesadaran hukum yang tinggi, tentu tidaklah semudah membalikkan tangan. Terwujudnya peningkatan peran anak-anak jalanan dan masyarakat sekitarnya dalam implementasi program pembangunan yang berbasis ipteks berkelanjutan

dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan fisik dan nonfisik, perlu digarap dengan sangat serius.

## **2. Analisis SWOT**

### **2.1 Kekuatan (*Strength*)**

Secara umum, anak-anak jalanan berjumlah cukup banyak (ratusan), bahkan makin meningkat tiap tahun. Masyarakat yang ada dan hidup bersama anak-anak jalanan juga sangat banyak, bahkan mereka menyatu dengan kehidupan sehari-hari anak-anak jalanan ini. Mereka bisa bangkit dan sadar dengan semangat baru. Pemerintah daerah dan akademisi diharapkan bisa menjadi daya dukung yang optimal bagi revitalisasi peran ini, dan secara khusus tersedia sebagai berikut.

- a. Berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Perda No. 10 Tahun 2001 tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Tersedianya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur yang baik;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- e. Tertatanya struktur organisasi;
- f. Tersedianya model-model pemberdayaan masyarakat.

### **2.2 Kelemahan (*Weakness*)**

Secara umum, anak-anak jalanan dan masyarakat sekitar rentan terhadap penyakit fisik dan nonfisik, kurang peduli terhadap diri dan sekitarnya, tidak atau kurang berpendidikan, kurang perhatian, kurang uluran tangan, kumuh, dan bermental cukup rendah; secara khusus terdapat fakta sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan/operasionalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi (TUPOKSI) di kampung Pedongkelan belum maksimal;
- b. Belum tersedianya sistem informasi pendataan;
- c. Pemanfaatan dan penempatan SDM dan uluran tangan yang belum optimal;
- d. Kinerja aparat Bapemas dan pelayanan pada masyarakat belum optimal;
- e. Kurang optimalnya koordinasi antara unit-unit kerja yang ada di lingkungan Bapemas;
- f. Belum tersedianya anggaran yang memadai.

Di setiap sudut kota ada pusat perdagangan, terdapat peran pemerintah, uluran tangan dan perhatian banyak pihak, jika disertai partisipasi masyarakat secara aktif, mungkin saja akan mempengaruhi tingkat kehidupan mereka. Pendidikan dasar juga bersifat prodeo.

### **2.3 Peluang (*Opportunities*)**

- a. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat termasuk pengarus-utamaan gender;
- b. Adanya paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)
- c. Hubungan yang baik dengan Dinas/Instansi terkait, LSM dan PT dalam pemberdayaan masyarakat.
- d. Tersedianya lembaga kemasyarakatan yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat (LKMD, PKK, dan lain-lain) serta kader-kader pembangunan desa sebagai penggerak/motivator pembangunan;
- e. Dukungan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- f. Dukungan Renstra Propinsi DKI dan Pemkot Jakarta Timur;
- g. Komitmen semua pihak dalam memberdayakan masyarakat

### **2.4 Ancaman (*Threat*)**

Pada prinsipnya, apabila anak jalanan makin membludak dan tidak dikendalikan dengan baik, maka mungkin saja teritori akan makin mewabah tidak saja di Pedongkelan, akan tetapi bisa di mana-mana terdapat ratusan anak jalanan berkeliaran dan memancing kriminalitas. Terdapat ancaman khusus sebagai berikut.

- a. Jumlah penduduk miskin di Pulogadung dan anak jalanan serta gelandangan yang makin bertambah;
- b. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota;
- c. Belum dipahaminya pengarus-utamaan jender dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak

- d. Belum terwujudnya suasana kemitraan hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif; yang memberi efek positif bagi pembangunan dan pemberdayaan anak jalanan
- e. Situasi ekonomi, politik dan keamanan yang belum stabil;
- f. Belum tertatanya hubungan antara lembaga kemasyarakatan;
- g. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

### **3. Analisis Lingkungan Strategi**

Selanjutnya terhadap faktor internal dan eksternal tersebut diadakan pencermatan lingkungan internal dan eksternal yang menghasilkan kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal melalui pembobotan, rating dan skor yang hasilnya merupakan daftar prioritas faktor lingkungan internal dan eksternal.

Pembobotan adalah kemungkinan (*probability*) yang memberikan dampak dari faktor organisasi terhadap keberhasilannya masa kini dan sasaran ke depan, bobotnya pada masing-masing faktor pada (PLI, PLE) mulai dari 1,00 (yang teramat penting) sampai dengan 0,00 (yang tidak teramat penting).

*Rating* adalah langkah memberikan nilai yang berkaitan dengan respon manajemen organisasi terhadap faktor strategik internal dan eksternal, nilainya berkisar 5,00 (paling menonjol) sampai dengan 1,00 (paling tidak menonjol). Hasil perkalian antara bobot dan *rating* akan menghasilkan skor bobot (nilai) dari masing-masing faktor lingkungan. Sehingga dapat disusun urutan prioritas lingkungan strategik berupa kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal (KAFI dan KAFE) sebagai berikut.



**Tabel 1 KAFI (Kesimpulan Analisis Faktor Internal)**

No.	Faktor-faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor	Kesimpulan
	<b>Kekuatan</b>				
1	Berlakunya UU No.22 Th. 1999	0.07	1	0.07	Prioritas 10
2	Perda No. 10 Tahun 2001 tentang Bapermas	0.1	5	0.5	Prioritas 1
3	Tersedianya SDM dengan kuantitas dan kualitas memadai	0.09	2	0.14	Prioritas 4
4	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	0.07	2	0.14	Prioritas 8
5	Tertatanya struktur organisasi	0.09	4	0.36	Prioritas 2
6	Tersedianya model-model pemberdayaan masyarakat yang telah diujicoba	0.08	3	0.24	Prioritas 5
	<b>Kelemahan</b>				
1	TUPOKSI belum dapat dioperasionalkan secara optimal	0.1	5	0.5	Prioritas 1
2	<i>Database dan Management Information System</i> masih lemah	0.06	1	0.06	Prioritas 11
3	Pemanfaatan dan penempatan SDM belum optimal	0.09	4	0.36	Prioritas 2
4	Kinerja aparat Bapermas belum optimal	0.08	3	0.24	Prioritas 5
5	Koordinasi di antara unit-unit kerja yang ada di lingkungan Bapemas belum optimal	0.08	2	0.16	Prioritas 7
6	Anggaran yang tersedia belum memadai	0.09	3	0.27	Prioritas 4
		1			

**Tabel 2 KAFE (Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal)**

No.	Faktor-faktor Eksternal Strategik	Bobot	Rating	Skor	Kesimpulan
	Peluang				
1	Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat dan pengarus-utamaan gender dan perlindungan anak	0.1	5	0.5	Prioritas 1
2	Diberlakukannya paradigma <i>good governance</i>	0.08	4	0.32	Prioritas 3
3	Hubungan yang baik dengan LSM dan Perguruan Tinggi dalam pemberdayaan masyarakat	0.06	1	0.06	Prioritas 11
4	Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader-kader pembangunan desa/kampung	0.07	3	0.21	Prioritas 6
5	Dukungan partisipasi masyarakat	0.06	2	0.12	Prioritas 9
6	Dukungan Renstra DKI dan Jaktim	0.07	3	0.21	Prioritas 6
7	Komitmen semua pihak dalam memberdayakan masyarakat	0.06	2	0.12	Prioritas 9
	TANTANGAN				
1	Jumlah penduduk miskin, dan anak jalanan Pedongkelan yang cukup besar	0.1	5	0.5	Prioritas 2
2	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota	0.07	3	0.21	Prioritas 6

No.	Faktor-faktor Eksternal Strategik	Bobot	Rating	Skor	Kesimpulan
3	Belum dipahaminya pengarusutamaan jender	0.09	4	0.36	Prioritas 2
4	Belum optimalnya suasana kemitraan kerja antara legislatif dan eksekutif	0.07	3	0.21	Prioritas 6
5	Situasi ekonomi, politik dan keamanan yang belum stabil	0.05	1	0.05	Prioritas 12
6	Belum tertatanya lembaga kemasyarakatan	0.06	2	0.12	Prioritas 9
7	Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih dalam kondisi pemulihan kembali	0.06	2	0.12	Prioritas 9
		1			

Dalam KAFI dan KAFE selanjutnya dianalisis melalui analisis *Strength, Weakness, Opportunity dan Threat* (SWOT) dengan memakai:

- Asumsi Strategi SO yakni menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
- Asumsi Strategi WO yakni mengkaji kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
- Asumsi Strategi ST yakni pakai kekuatan untuk menghadapi tantangan atau mengubahnya menjadi peluang.
- Asumsi Strategi WT yakni perkecil kelemahan dan hindari tantangan.

Dari asumsi strategi tersebut merupakan langkah analisis strategis dan pilihan (*strategic analysis and choice / SAC*) melalui analisis SWOT sebagai berikut.

**Tabel 3 Analisis SWOT**

KAFI KAFE	<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
	1. Perda No. 10 Th. 2001 tentang Bapemas;	1. Pelaksanaan/ operasionalisasi Tupoksi belum maksimal;
	2. Tertatanya struktur organisasi;	2. Pemanfaatan dan penempatan SDM belum optimal;
	3. Tersedianya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang baik;	3. Belum tersedianya anggaran yang memadai;
	4. Tersedianya model-model pemberdayaan masyarakat	4. Kinerja aparat Bapermas dan pelayanan pada masyarakat belum optimal;
	5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;	5. Kurang optimalnya koordinasi antar unit-unit kerja yang ada di lingkungan Bapermas;
	6. Berlakunya UU No. 22 Tahun 1999;	6. Belum tersedianya sistem informasi dan pendataan;

**Tabel 4 Analisis SWOT**

<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>	<b>Kekuatan vs Peluang (SO)</b>	<b>Kelemahan vs Peluang (WO)</b>
1. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat dan anak jalanan serta pengarus-utamaan gender;	1. Dengan terbitnya Perda 10 Th. 2001 dan dukungan paradigma pemberdayaan akan mewujudkan kemandirian masyarakat dan perlindungan anak	1. Pelaksanaan Tupoksi yang belum optimal dapat ditunjang dengan hubungan yang baik dengan instansi terkait, LSM dan PT; (1-7)

	dan kesetaraan gender (1 – 1)	
2. Paradigma <i>good governance</i> ;	2. Dengan tersedianya kualitas SDM yang cukup baik dan dukungan partisipasi masyarakat maka kesejahteraan akan tercapai (4-6)	2. Penempatan SDM yang belum optimal dapat diperkuat dengan semangat <i>good governance</i> ; (2-2)
3. Tersedianya kelembagaan masyarakat dan KPD;	3. Dengan tersedianya model-model pemberdayaan masyarakat dan KPD yang ada maka pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan (3-3)	3. Anggaran yang belum memadai dapat diatasi dengan adanya komitmen semua pihak dalam memberdayakan masyarakat, yang ditunjang oleh adanya partisipasi masyarakat; (2-4, 6)
4. Komitmen semua pihak dalam memberdayakan masyarakat;	4. Dengan tertatanya struktur organisasi dan adanya paradigma <i>good governance</i> maka peningkatan kinerja aparatur Bapemas akan terwujud;	4. Kinerja aparat Bapemas yang belum optimal dapat dipacu dengan memanfaatkan suasana paradigma <i>good governance</i> ; (4-2)
5. Dukungan Renstra DKI dan Jaktim;	5. Dengan tersedianya sarana dan prasarana	5. Belum optimalnya koordinasi antar unit

	yang memadai serta dukungan dari LSM dan PT maka tujuan pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan; (6-6)	kerja dapat diatasi dengan memanfaatkan komitmen dan dukungan Renstra Jaktim; (5-4,5)
6. Dukungan partisipasi masyarakat;	6. Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan Renstra Jaktim yang ditunjang oleh komitmen semua pihak dalam memberdayakan masyarakat akan mempercepat tercapainya kemandirian dan keswadayaan masyarakat (6-4)	6. Belum optimalnya sistem informasi dan pendataan dapat ditunjang dengan memanfaatkan dukungan kelembagaan, KPD dan hubungan baik dengan instansi terkait, LSM dan PT; (6-3,7)
1. Hubungan yang baik dengan dinas/instansi terkait, LSM dan PT dalam pemberdayaan masyarakat;		
<b>Tantangan (<i>Threats</i>)</b>	<b>Kekuatan vs Tantangan (ST)</b>	<b>Kelemahan vs Tantangan (WT)</b>
1. Jumlah penduduk miskin dan anak jalanan Jaktim yang	1. Dengan adanya Perda 10 Th. 2001 maka pemahaman	1. Dengan mengoptimal-kan Tupoksi Bapemas

besar;	tentang pemberdayaan masyarakat dan pengarus-utamaan gender akan meningkat; (1-2)	maka penduduk miskin bias dikurangi (1-1)
2. Belum dipahaminya pengarus-utamaan gender dan amanah untuk perlindungan anak;	2. Dengan mengacu pada UU No. 22 Th 1999 maka koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi dan kab/kota dapat dioptimalkan (6-3)	2. Melalui perbaikan kinerja aparat Bapemas maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa meningkat (4-6)
3. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat, propinsi dan kab/kota;	3. Dengan tertatanya struktur organisasi Bapemas melalui Perda No.10 Th. 2001 maka lembaga kemasyarakatan akan dapat tertata dengan baik (6-5)	3. Melalui penempatan dan pemanfaatan SDM yang tepat maka penataan kelembagaan masyarakat bisa dilaksanakan (2-5)
4. Belum terwujudnya suasana kemitraan kerja antara legislatif dan eksekutif; dan efek bagi masyarakat	4. Dengan mengimplemen- tasikan model-model pemberdayaan masyarakat yang ada di Bapemas maka kemiskinan dapat	4. Dengan memperbaiki hubungan kemitraan kerja dengan legislative maka kekurangan anggaran bisa diatasi

	diatasi (4-1)	(3-4)
5. Belum tertatanya lembaga kemasyarakatan;	5. Dengan mendayagunakan kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Bapemas akan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (3-6)	5. Dengan memperbaiki koordinasi antara pusat, pro dan kota maka kebutuhan anggaran bisa teratasi (4-4)
6. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;	6. Dengan mengoptimalkan pelaksanaan Perda No. 10 Th 2001 didukung oleh kualitas SDM yang ada diharapkan dapat mendukung suasana kemitraan kerja dengan legislatif	6. Melalui penataan sistem informasi pendataan diharapkan optimalisasi koordinasi dengan pusat, prop, dan kota dapat terwujud (6-3)
7. Situasi ekonomi politik dan keamanan yang belum stabil	7. Dengan penerapan model-model pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada akan membantu pulihnya situasi politik,	7. Dengan meningkatkan kinerja aparat Bapemas maka pemahaman pengarus-utamaan gender dan perlindungan anak dapat baik (4-2)



	ekonomi dan keamanan (4-5-7)	
--	---------------------------------	--

#### 4. Usulan Strategi yang Harus Ditetapkan dalam Rangka Pemberdayaan

Strategi harus ditetapkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang standar hidupnya sangat rendah pada kondisi yang lebih baik dalam artian ekonomi, sosial-budaya dan politik. Hal ini berarti menyangkut usaha-usaha pertumbuhan modal, tenaga kerja berkualitas, kesempatan kerja, perkembangan teknologi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Salah satu kerangka kebijakan pembangunan yang dianggap dapat efektif untuk mengatasi kemiskinan yaitu suatu kerangka yang secara seimbang mengakomodasikan tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi di satu pihak dan pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui program-program pembangunan yang bersifat distributif di lain pihak. Kerangka tersebut harus mengandung perpaduan yang serasi antara peningkatan dan pemantapan program-program pembangunan pangan/pertanian dan pengembangan program-program industrialisasi yang memiliki kaitan-kaitan yang kuat dengan pengembangan sektor pangan.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, program pemberdayaan yang tepat bagi anak jalanan dan warga Pedongkelan Pulogadung secara garis besar sebagai berikut.

- Penerapan program ipteks dan *character building* (bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun)
- Penerapan program sinergi religi dan pengenalan potensi ekonomi (bisa 1 tahun kemudian/tahap kedua)
- Penerapan program pemantapan ekonomi dan sadar hukum (tahapan terakhir/tahun ketiga)

Metode Penerapan dilakukan dalam tiga tahapan (3 tahun).

##### Tahun I

Pada tahun I difokuskan pada penerapan program ipteks dan *character building*. Penerapan program ipteks bermaksud memberi arahan dan bekal

bagaimana menyadarkan anak-anak jalanan akan bisa berperannya mereka dalam dunia ipteks dengan bantuan uluran tangan akademisi dan pemerintah daerah.

*Character building* bermaksud membekali anak-anak jalanan dan masyarakat dalam kancan kehidupan yang lebih bernutu, supaya lebih toleran, punya jati diri, percaya diri dan mampu mengendalikan diri. Adapun kegiatan yang telah dilakukan meliputi:

1. Sosialisasi program dan koordinasi dengan para 'pengabdian'
2. *Need assesments* tentang kebutuhan anak jalanan dan masyarakat sekitar
3. Penyuluhan hukum bisnis
4. Penyuluhan tentang peluang dan rencana bisnis
5. Penyuluhan tentang dampak sosial pembangunan dan ancaman narkoba
6. Penyuluhan tentang pentingnya pendidikan
7. Penyuluhan tentang *character building*
8. Pengajian bulanan

Berdasarkan hasil *need assesment*, diketahui gambaran umum kebutuhan atau pun tindakan yang perlu dilakukan, yang rencananya akan dimulai pada semester kedua. Pada semester 2 kegiatan lebih baik ditonjolkan pada pelatihan dan *action* secara partisipatif. Peluang bisnis dan kewirausahaan akan digalakkan pada semester 2, yang jenis kegiatan ini akan didasarkan pada hasil *need asesment*.

1. Bidang pembelajaran yakni kejar paket b dan paket c
2. Keterampilan dalam mengoperasikan komputer (tahap awal)
3. Keterampilan dalam menggunakan mesin jahit
4. Keterampilan membuat olahan makanan (misal kacang telur, es cendol, soto)
5. Keterampilan membuat sulaman dan renda
6. Keterampilan membuat bunga dari bahan kertas
7. Keterampilan membuat spreng (atau keterampilan lain yang setara)
8. Pelatihan dan praktek mencari peluang pasar
9. Penyuluhan kesehatan masyarakat

## **Tahun II**

Tahun kedua lebih difokuskan pada pelbagai pelatihan secara partisipatif aktif, dan siraman rohani agar secara nonfisik, mental dan moral mereka bukan lagi sebagai preman, akan tetapi lebih berbudi dan santun serta menguasai dan mengamalkan agamanya. Praktek penguasaan komputer dan internet serta peralatan yang menunjang juga akan dilakukan pada tahap ini. Pengenalan potensi ekonomi dan didukung turun ke lapangan industri, yang bisa digali dan dijual dari dirinya (bernilai komersiil) juga sangat relevan untuk dilakukan, menyambung pelbagai penyuluhan tahun 1.

Pembekalan mental spiritual menjadi kegiatan penting yang terus menerus harus dilakukan. Praktek penguasaan komputer dan internet serta peralatan yang menunjang juga akan dilakukan pada tahap ini. Pengenalan potensi ekonomi dan didukung turun ke lapangan industri, yang bisa digali dan dijual dari dirinya (bernilai komersiil) juga sangat relevan untuk dilakukan, menyambung pelbagai penyuluhan tahun 1.

## **Tahun III**

Tahun ketiga lebih difokuskan pada pemantapan peran dalam bidang ekonomi dan terwujudnya masyarakat yang sadar hukum. Upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan penyuluhan hukum secara berkesinambungan sehingga menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) pada tata hukum Indonesia. Rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya akses masyarakat tentang informasi hukum dan budaya masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya untuk membuka wawasan pengetahuan hukum warga masyarakat agar lebih memahami akan hukumnya sendiri, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa, maupun untuk tujuan peningkatan kesadaran hukum agar warga makin taat hukum dan melek hukum. Pada hakikatnya upaya ini dilakukan dengan memberi bekal materi pengetahuan hukum tentang sistem hukum, kemudian dilanjutkan pada hukum perdata dan hukum pidana, yang sangat penting untuk diketahui oleh

warga masyarakat. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan Metode Ceramah dan Metode Pelatihan.

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta kesadaran hukum serta keterampilan para peserta tentang materi hukum perdata dan hukum pidana. Penyuluhan hukum tidak hanya berguna bagi warga yang bersangkutan, tetapi juga yang terpenting adalah akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kesadaran hukum dalam rangka menjadi warga yang taat hukum di negara hukum. Para selama ini belum pernah mengikuti penyuluhan, sehingga sulit bagi mereka membedakan hukum perdata dan hukum pidana serta proses acara peradilannya. Dengan adanya penyuluhan ini, para warga dapat memahami dan membedakan kedua jenis hukum tersebut. Untuk dapat melaksanakan upaya hukum, para peserta perlu diberi pelatihan lebih lanjut atau bimbingan dalam pelaksanaan penulisan hukum di lapangan. Jadi kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta kesadaran hukum serta keterampilan para peserta tentang materi hukum perdata dan hukum pidana. Kemudian diadakan evaluasi proses yang dilakukan selama berlangsungnya kegiatan, juga diberikan *pre test* dan *post test* untuk mengetahui respon sadar hukum mereka.

Sesuai dengan metode penelitian ini, maka pola pemberdayaan yang dihasilkan berdasarkan penelitian ini adalah menggunakan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Secara garis besar sebagai berikut.

- (1) **Memberi perhatian dengan membuka peluang.** Anak-anak jalanan biasanya merupakan produk kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi kesenjangan dan ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada peluang dan kegiatan ekonomi sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi dan akses yang lebih baik. Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan dalam kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

**(2) Melakukan program Sektoral secara serius dan berkesinambungan.**

Program yang telah ada umumnya berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas, dan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang secara langsung menunjukkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Program pembangunan regional diarahkan pada pengembangan potensi dan kemampuan sumberdaya manusia dan prasarana dasar yang ada di daerah, khususnya daerah tempat mangkal dan menginap anak jalanan sehingga swadaya dan kreativitas masyarakat dapat ditingkatkan. Jadi harus lebih mengarah pada *grass root* dan lebih serius secara sektoral.

**(3) Program pembangunan yang benar-benar dapat mengurangi jumlah anak jalanan dan penduduk miskin.**

Disadari pula bahwa upaya ini tidak mudah karena penduduk miskin yang tersisa dewasa ini adalah yang terendah kemampuannya dan semakin terkonsentrasi di kantong- kantong kemiskinan, mereka terperangkap oleh keterisolasian dan keterbelakangan, yang hanya dapat ditembus dengan upaya khusus diselenggarakan untuk mengatasinya. Selain itu 'budaya' garuk sesaat tidaklah tepat, karena hanya memancing emosi warga, dan tidak menyelesaikan masalah.

**(4) Upaya penanggulangan premanisme dan kejahatan.** Kegiatan dapat dituangkan dalam tiga arah kebijaksanaan:

- (a) Kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penang gulangan kemiskinan, pengangguran, pelanggaran moral dan kriminalitas
- (b) Kebijakan yang langsung ditujukan kepada anak jalanan dan masyarakat miskin dengan perhatian dan monitoring evaluasi, sanksi dan penghargaan
- (c). Kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan anak jalanan dan penduduk miskin tersebut sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

- (5) **Perubahan perilaku dan moral.** Kegiatan ini terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan dasarnya, kebutuhan agama dan pengembangan kegiatan ekonominya. Dalam rangka itu pula, pelayanan bagi orang jompo, penderita cacat, yatim piatu, anak jalanan dan kelompok masyarakat lain yang memerlukan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menanggulangi kemiskinan. Program ini harus dilaksanakan secara selektif dan terarah dengan memperhitungkan eketersediaan sumberdaya. Langkah yang diperlukan adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi dan jangkauan program tersebut. Searah dengan itu pengembangan sistem jaminan sosial secara bertahap perlu terus ditingkatkan.
- (6) **Program pemenuhan kebutuhan dasar.** Bantuan langsung tunai atau pun BBM subsidi, KUR perlu dikaji ulang, untuk memastikan mana yang langsung bisa mengangkat derajat ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan itu pengembangan informasi dasar yang terkait dengan profil penduduk miskin dan wilayah miskin harus dapat digunakan sebagai dasar bagi penentuan kelompok sasaran secara tepat dan terarah.
- (7) **Pelaksanaan program secara terpadu dan bertahap.** Keterpaduan antara pelaksanaan, penanggulangan kemiskinan dan anak jalanan menyangkut keterpaduan program dan lokasi pembangunan. Disamping itu, program pengentasan kemiskinan yang menjangkau masyarakat akan lebih efektif jika direncanakan dan dilaksanakan dalam unit yang berkelompok (agregatif). Namun demikian tingkat agregasi tersebut harus sedekat mungkin dengan kelompok sasaran, artinya dengan kelompok rakyat miskin yang ingin dibantu itu.
- (8) **Pendekatan psikososial dengan kelompok sasaran.** Semakin dekat dengan mereka akan semakin efektif, perlu pendekatan psikologi sosial untuk merangkul mereka. Oleh sebab itu apapun bentuknya, pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, dan pelaksanaan harus menjadi tanggung jawab bersama dari segenap pelaku ekonomi dan masyarakat secara keseluruhannya. dalam rangka itulah upaya penanggulangan anak jalanan dan kemiskinan harus ditempatkan sebagai gerakan nasional yang

meliputi semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi- organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

**(9) Upaya meningkatkan kemampuan berproduksi dan menciptakan nilai tambah.** Kegiatan ini harus diawali dengan hal-hal berikut ini:

- (a) Tersedianya akses terhadap sumberdaya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berupa ketrampilan,
- (b) Tersedianya akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien,
- (c) Tersedianya akses terhadap pasar, dimana produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah.

Sebelum kegiatan dimulai, perlu dilaksanakan persiapan terlebih dahulu dengan menyiapkan data dan peralatan serta narasumber yang dibutuhkan pada pelaksanaan program. Jumlah anak jalanan yang mencapai ratusan dan masyarakat sekitar sebagai pemangkunya menjadi subyek fokus yang harus digarap secara maksimal. Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan berbagai pihak yakni aparat desa sampai dengan Pemerintah kota, dari akademisi dan praktisi serta mahasiswa. Pemantauan dan evaluasi kegiatan akan dilakukan per semester dan akan dibuat laporan hasil kegiatan per *event*.

Dengan demikian, tahun ketiga lebih difokuskan pada pemantapan peran dalam bidang ekonomi dan terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan lebih bermoral.

Upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan penyuluhan hukum secara berkesinambungan sehingga menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) pada tata hukum Indonesia. Rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya akses masyarakat tentang informasi hukum dan budaya masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya untuk membuka wawasan pengetahuan hukum warga masyarakat agar lebih memahami akan hukumnya sendiri, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa, maupun untuk tujuan peningkatan kesadaran hukum agar warga makin taat hukum

dan melek hukum. Pada hakikatnya upaya ini dilakukan dengan memberi bekal materi pengetahuan hukum tentang sistem hukum, kemudian dilanjutkan pada hukum perdata dan hukum pidana, yang sangat penting untuk diketahui oleh warga masyarakat.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode berikut:

1. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif seperti sistem, asas, serta langkah-langkah dalam peradilan perdata dan pidana.

2. Metode Pelatihan

Dalam metode ini, kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah pembimbingan dan pelatihan bagi para peserta untuk membuat pengaduan ataupun gugatan. Kegiatan ini antara lain berupa pembimbingan dan pelatihan tentang penulisan hukum, meskipun pada tingkat awal.

**5. Pelaksanaan Peran Pemerintah, Akademisi dan lembaga terkait**

Pemerintah menjadi penanggungjawab keberhasilan program pemberdayaan warganya, namun demikian perlu partisipasi aktif warga itu sendiri dan kerjasama dengan berbagai institusi yang mendukung, seperti halnya perguruan tinggi, maupun perusahaan (dengan menggunakan CSR-nya).

Pemerintah bertugas sebagai berikut.

1. Memfasilitasi dana dan prasarana pemberdayaan serta kemudahan birokrasi
2. Memudahkan layanan tanggap cepat terhadap keluhan warga demi keberhasilan program ini
3. Memfasilitasi dan membantu penyediaan alat perlengkapan yang dibutuhkan selama pengabdian berlangsung
4. Membangun iklim yang kondusif bagi terciptanya kerjasama dan partisipasi aktif perusahaan, masyarakat dan lembaga terkait (Departemen sosial, tenaga kerja, peranan wanita)
5. Memonitoring dan mengevaluasi keberhasilan program, dan



6. Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berhasil (sekedar insentif kepedulian dan perhatian).

Peran Perguruan Tinggi sebagai bentuk Tri Dharma ke tiga: Pengabdian kepada masyarakat, yakni membantu masyarakat untuk berdaya guna dan berhasil guna, menjadi fasilitator dengan pemerintah, sekaligus untuk:

1. Memandu dan mendampingi semua anggota Tim dari instansi lain
2. Menjadi fasilitator terdekat (terakrab) dengan subyek
3. Mempersiapkan segala sesuatu mengenai persiapan turun lapangan
4. Melakukan Pre observasi
5. Menjalin kerjasama, loby dan mengatur jadwal
6. Mengikuti dan mencatat rekam jejak dan monitoring
7. Mempersiapkan panduan pelatihan dan narasumber yang dibutuhkan baik dalam bidang hukum, ekonomi, psikologi, sosiologi, pendidikan dan kesehatan
8. Memberikan bekal keilmuan sesuai kepakarannya
9. Mempersiapkan materi pelatihan
10. Memberikan motivasi dan praktek kewirausahaan
11. Memotivasi secara mendalam dari hati ke hati anak jalanan serta mencatat dan menanggapi keluhan kesah dan harapannya

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Program pemberdayaan yang tepat bagi anak jalanan dan warga Pedongkelan Pulogadung secara garis besar sebagai berikut.
  - a. Penerapan program ipteks dan *character building*
  - b. Penerapan program sinergi religi dan pengenalan potensi ekonomi
  - c. Penerapan program pementapan ekonomi dan sadar hukum

Upaya yang perlu dilakukan adalah memberi perhatian dengan membuka peluang, Melakukan program Sektoral secara serius dan berkesinambungan, Program pembangunan yang benar-benar dapat mengurangi jumlah anak jalanan dan penduduk miskin, upaya penanggulangan premanisme dan kejahatan, upaya penanggulangan premanisme dan kejahatan.. Pelaksanaan program secara terpadu dan bertahap, pendekatan psikososial dengan kelompok sasaran, upaya meningkatkan kemampuan berproduksi dan menciptakan nilai tambah \

2. Peran Pemerintah, Akademisi dan lembaga terkait sangat penting yakni pelaksanaan koordinasi dan partisipasi aktif semua pihak, antar lembaga dan masyarakat. Pemerintah menjadi penanggungjawab keberhasilan program pemberdayaan warganya, namun demikian perlu partisipasi aktif warga itu sendiri dan kerjasama dengan berbagai institusi yang mendukung, seperti halnya perguruan tinggi, maupun perusahaan (dengan menggunakan CSR nya).

## **2. Saran**

1. Bagi pemerintah, seharusnya lebih serius menangani masalah perkotaan ini, baik dari segi dana, program pengentasan kemiskinan, penanganan premanisme anak jalanan dan pelaksanaan pemberdayaan serta segala hal perangkat hukumnya.
2. Bagi warga masyarakat, bangkitlah, telapak tangan di atas lebih baik daripada di bawah, jangan pernah menggantungkan hidup pada kemiskinan dan ketidakberdayaan. Jangan selalu menyanyikan ‘derajat kita sama di mata Tuhan’, akan tetapi tiada daya upaya dan doa.
3. Bagi perguruan tinggi dan instansi lain yang terketuk nuraninya, seharusnya perkecil kesenjangan antara *das Sein* dan *das Sollen*, mari majukan negeri bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- M., Amirullah, dan M. Oktaufik. "Tantangan dan Peluang Teknologi Industri". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1 No. 1 Malang: Universitas Gajayana, 2000.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Seminar Hukum Nasional Keenam Buku I- II*. Jakarta: Kepkeh BPHN, 1994.
- Depdikbud. *Strategi pengembangan peranserta masyarakat di bidang pendidikan*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 1995.
- Dusseldorp, Van D., B.W. M. *Participant in planned development influenced by governments of developing countries at local in rural areas*. The Nederland: Department of Rural Sociology in the Tropics and Sub Tropics Agricultural, University Wegenigen, 1981.
- Koestoro, Budi. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Balitbang Depdiknas, 1993.
- Purwaningsih, Endang. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Kediri: Jenggala Pustaka Utama, 2009.
- . Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual Warisan Bangsa, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* UNDIP No. 41 ed. Januari 2012.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Soenyono. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2011.
- Swasono, Meutia F. Ed. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UI Press, 1993.